

B A B III

INTEGRASI KEKUATAN POLITIK ISLAM :

KASUS PARTAI MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI) 1966-1973

A. Organisasi-organisasi Sebagai Unsur.

Organisasi-organisasi pendukung berdirinya partai Muslimin Indonesia adalah terdiri dari eks anggota istimewa Masyumi dan organisasi lain yang tidak mau menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik yang sudah ada. Organisasi itu sebelumnya sudah tergabung dalam Badan Kordinasi Amal Muslimin yang sengaja dipersiapkan untuk meneruskan Masyumi apabila direhabilitasi. Tapi, gagalnya rehabilitasi Masyumi itu menyebabkan Badan Kordinasi Amal Muslimin akhirnya mempersiapkan berdirinya Parmusi.¹

Organisasi-organisasi itu berjumlah 16 buah,² yang terdiri dari berbagai macam organisasi yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang berbeda, tapi perlu dicatat bahwa organisasi-organisasi itu semuanya mempunyai latar belakang Islam. Organisasi itu ada yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan, dakwah dan juga organisasi profesi seperti guru, seniman dan buruh.

Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan dan dakwah adalah terdiri dari Muhammadiyah, Persisi, Al-Irsyad, Nahdlatul Wathan, PITI Wanita Islam, Jami'atul Washliyah, Mathlaul Anwar, dan

¹Wawancara dengan bapak Djarnawi Hadikusumo, 31 Oktober 1986, di Yogyakarta.

²K E. Ward, The Foundation of The Partai Muslimin Indonesia, Cornell University, Ithaca, New York, 1970, hal. 69-70.

Persatuan Umat Islam. Sedangkan organisasi yang bergerak dalam bidang profesi adalah Gabungan Sarikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo), Sarikat Nelayan Islam Indonesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka (KBIM), Persatuan Organisasi Buruh Islam se-Indonesia (Porbi-si), Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) dan Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia (PGAIRI).

Organisasi yang bergerak dalam bidang profesi khususnya perburuhan, sekarang sudah menjadi satu dalam organisasi perburuhan nasional yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Maka dari itu organisasi ini tidak akan dibahas satu persatu di sini, sedangkan yang akan di bahas di sini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan dan dakwah yang sampai sekarang masih tetap berdiri dan tambah berkembang, organisasi itu terdiri dari :

Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah suatu perkumpulan yang berasaskan Islam, didirikan terutama terletak dalam cita-cita agama. Karenanya Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berusaha membersihkan Islam dari segala pengaruh yang jelek disamping pula menghidupkan kembali kesadaran di kalangan umat Islam untuk kembali kepada kepercayaan yang benar berdasarkan al-Qur'an dan al-hadits.³ Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Haji Ahmad Dahlan.⁴

Walau organisasi ini non-politik dan memang ti-

³A. Jainuri, Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa Pada Awal Abad ke Duapuluh, Bina Ilmu, Surabaya, 1981, hal. 34.

⁴Suara Muhammadiyah, No. 16 Tahun ke-65/Agustus - II, 1985, hal. 16.

tidak pernah menyatakan dirinya sebagai partai politik, namun karena pada masa penjajahan terutama menjelang kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan banyak menuntut semua warga negara Indonesia untuk melibatkan diri dalam percaturan politik, maka Muhammadiyah tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan itu. Hal itu dapat dilihat pada keikutsertaan Muhammadiyah dalam M.I.A.I., kemudian dalam Masyumi dan yang terakhir adalah memprakarsai berdirinya Partai Muslimin Indonesia setelah usaha rehabilitasi Masyumi tidak berhasil.⁵

Persatuan Islam (Persis).

Persatuan Islam didirikan pada tanggal 17 September 1923 atas prakarsa Kyai Haji Zamzam dari Palembang. Organisasi ini bertujuan mengembalikan kaum Muslimin kepada al-Qur'an dan al-Hadits, menghidupkan ruh Ijtihad dan Jihad, membasmi segala macam bid'ah, dengan mempergiat dakwah Islamiyah kepada segenap lapisan masyarakat.⁶ Persis memang berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad XX, yaitu dengan ciri kegiatannya menitik beratkan pada pembentukan faham keagamaan.⁷

Para pemimpin Persis menegaskan bahwa Persis adalah organisasi keagamaan, tetapi bukan berarti mereka meninggalkan kegiatan politik, karena mereka berprinsip bahwa untuk menegakkan Ideologi Islam dalam

⁵ Suara Muhammadiyah, No. 12 Tahun ke - 66/Juni II 1986, hal. 20.

⁶ Hasan Sadely, Ensiklopedi Indonesia 5, Ikhtiar Baru - Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, 1984, hal. 2686.

⁷ Syafiq A Mughni, Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal, Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hal. 52.

masyarakat senantiasa menuntut kegiatan-kegiatan politik. Berangkat dari prinsip inilah, maka tokoh-tokoh - Persis ikut serta dalam kongresi umat Islam Nopember 1945 di Yogyakarta yang memutuskan berdirinya Masyumi sebagai satu-satunya partai politik Islam Indonesia.

Keterlibatan Persis dan para anggotanya dalam percaturan politik dapat dilihat pada pasang surut perjuangan partai politik Masyumi. Persis sebagai anggota istimewa dari partai itu telah menampilkan beberapa tokoh-tokohnya menjadi pimpinan pusat Masyumi. Demikian pula berakhirnya Persis dalam percaturan politik bersama dengan berakhirnya Masyumi dalam bidang yang sama, yaitu ketika Sukarno melarang partai itu mengadakan kegiatan pada tahun 1959. Sejak saat itulah beberapa anggota istimewanya termasuk Persis memisahkan diri dan kembali memusatkan kegiatannya pada program-program pendidikan dan kemasyarakatan.⁸

Kemudian, ketika para organisasi eks anggota Masyumi berusaha menghidupkan kembali partai itu, Persis juga tidak ketinggalan. Setelah rehabilitasi Masyumi tidak berhasil maka Persis mendukung berdirinya - Partai Muslimin Indonesia sebagai saluran aspirasi dari eks anggota Masyumi.

Al-Irsyad.

Al-Irsyad didirikan oleh Syekh Ahmad Syurkati pada tahun 1915 dan merupakan organisasi non-politik, yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan. Organisasi ini juga berusaha mengembangkan pemurnian

⁸I b i d., hal. 122 - 123.

terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi,⁹ sebagaimana organisasi pembaharuan lainnya.

Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Husain A. Badje - rei mengatakan bahwa Al-Irsyad pernah terjun dalam kancah politik dengan cara bergabung dengan MIAI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan Masyumi. Menurut Husain hal itu adalah dalam rangka persatuan umat Islam.¹⁰ Demikian juga pada waktu organisasi non-politik eks anggota istimewa Masyumi bergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin (BKAM) untuk mengusahakan rehabilitasi Masyumi, Al-Irsyad tidak ketinggalan pula di dalamnya. Bahkan ketika rehabilitasi Masyumi gagal, Al-Irsyad juga akhirnya ikut menandatangani piagam berdirinya Partai Muslimin Indonesia sebagai saluran aspirasi politik umat Islam yang belum bergabung dalam partai politik Islam yang ada.¹¹

Nahdlatul Wathan.

Nahdlatul Wathan adalah merupakan organisasi yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 di Pancor Lombok Timur NTB, oleh H. Abdul Madjid Zaenuddin, Nahdlatul Wathani Diniyah Islamiyah atau lebih terkenal dengan sebutan " HAMZANWADI ".¹²

Di bidang pendidikan organisasi ini mengalami

⁹Panji Masyarakat, 21 Pebruari 1984, hal. 28.

¹⁰I b i d., hal. 28.

¹¹Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusuma, 31 oktober 1986, di Yogyakarta.

¹²Mimbar Pendidikan Agama, No. 182 Zul Hijjah-Muharram 1047 H, September 1986, hal. 41.

kemajuan pesat yaitu dengan dimilikinya berbagai tingkatan sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian dibidang politik dapat dilihat pada keikutsertaan HAMZANWADI dalam anggota Konstituante tahun 1955 - 1959.¹³ Dan juga keterlibatan Nahdlotul Wathan dalam penandatanganan deklarasi berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI).

Persatuan Tionghoa Islam Indonesia yang disingkat PITI adalah merupakan organisasi dakwah yang didirikan pada bulan April 1961 di Jakarta atas prakarsa Abdul Karim Oei. Pada tahun 1972 organisasi ini berubah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islam. Perubahan itu terjadi berdasarkan pertimbangan bahwa organisasi ini dibentuk untuk menuju pembauran dan juga mengingatkan agama Islam tidak mengenal suku, termasuk orang Tionghoa.¹⁴

Sebagai organisasi dakwah, PITI banyak melakukan kegiatan keagamaan khususnya di kalangan warga Tionghoa. Dengan demikian tidak heran kalau Muslim Tionghoa di Indonesia bertambah banyak dan bermunculan pula muballigh dan muballighah dari kalangan mereka. Muslim Tionghoa sebagai warga negara Indonesia membutuhkan pula saluran aspirasi politiknya, dengan demikian PITI ikut serta bersama-sama dengan organisasi lainnya menandatangani deklarasi berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

¹³ I b i d., hal. 42.

¹⁴ Jawa Post, Sabtu 19 April 1986, hal. 1.

Wanita Islam.

Wanita Islam adalah organisasi pemuda dan wanita Islam, berasaskan Islam sehafas dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Organisasi ini bergerak dibidang keagamaan, sosial dan ekonomi antara lain menanamkan kesadaran beragama, memupuk semangat gotong-royong dan melaksanakan hidup berkoperasi serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. "Wanita Islam" juga giat dalam problem keluarga berencana, memberi nasehat tentang perkawinan, menyelenggarakan berbagai kursus, pendidikan umum, penyantunan sosial dan lain-lain.¹⁵

Anggota organisasi Wanita Islam sebagai warga negara Indonesia membutuhkan partai politik sebagai saluran aspirasi politiknya, dengan demikian mereka juga ikut mendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

Demikianlah sepintas kilas penjelasan tentang organisasi-organisasi pendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

¹⁵ Hasan Sadely, Ensiklopedi Indonesia 7, Ikhtiar Baru - Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Jakarta, 1984, hal. 3874.

B. Sejarah Berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Orde Baru (Jendral Suharto) untuk menstabilkan situasi Nasional adalah membubarkan PKI dan memberantas / mengikis habis semua orang yang terlibat dalam G 30 S / PKI dan semua antek-anteknya. Keikutsertaan kekuatan sosial politik khususnya umat Islam bersama-sama dengan tentara dalam pemberantasan PKI itu adalah sangat besar. Hal itu dapat dilihat pada kasus pembunuhan besar besaran terhadap partai terlarang itu -yang menurut pengamat diperkirakan mencapai setengah juta orang-¹⁶ yang banyak dilakukan oleh anggota organisasi Islam, termasuk eks anggota Masyumi.¹⁷

Terpanggilnya umat Islam untuk ikut serta dalam gerakan penumpasan PKI bersama-sama dengan tentara itu, karena mereka beranggapan bahwa dengan dihancurkannya-Komunis berarti masa depan Islam cerah atau paling tidak umat Islam telah kehilangan musuh utamanya. Oleh karena itu, pekik "ganyang PKI" pertama-tama disambut umat Islam dengan begitu bersemangat. Bersamaan dengan itu banyak fatwa yang disampaikan para ulama dan tokoh tokoh Islam lainnya bahwa memberantas Komunis dan kaum Komunis adalah termasuk jihad menentang musuh-musuh Allah dan yang melaksanakannya termasuk ibadah. di antara fatwa itu ialah fatwa pimpinan Muhammadiyah yang dikeluarkan pada rapat kilat tanggal 9-11 Nopember 1965

¹⁶ Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 154.

¹⁷ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gremidia, Jakarta, 1983, hal. 47.

di Jakarta yang menyatakan bahwa kegiatan mengikis habis PKI harus dipandang sebagai ibadah.¹⁸

✓ Bagi umat Islam dilenyapkannya PKI dari bumi Nusantara ini adalah merupakan kemengangan besar, karena dilingkungan umat Islam dirasakan bahwa konflik itu adalah merupakan suatu perjuangan antara umat Islam dan PKI atau antara Islam Komunisme, dimana hal itu sudah sering muncul dalam era sebelumnya. Dilatarbelakangi - pemikiran tersebut, maka banyak pendapat yang muncul dikalangan umat Islam yang menyatakan betapa jeleknya komunisme itu dan betapa pentingnya ajaran-ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam negeri ini.

Diantara apa yang disebutkan di atas adalah apa yang telah disampaikan oleh Prof. H.M. Rasyidi dalam kuliahnya yang berjudul : " Islam Menentang Komunisme" sebagai berikut :

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 menunjukkan watak Komunisme itu yang sesungguhnya. Mereka membunuh beberapa orang pimpinan tentara dan telah mempunyai persiapan untuk melakukan pembunuhan para pemimpin agama secara besar-besaran. Setelah Komunisme ini dapat ditundukkan dan dengan dilarangnya PKI maka kehampaan rohaniyah yang terjadi sebagai akibatnya harus diisi oleh Islam, agama yang dipeluk oleh 90% rakyat Indonesia. Ajaran-ajaran Islam harus diwujudkan dalam kehidupan nyata, khususnya yang berkenaan dengan keadilan sosial.¹⁹

Dalam sikap dan situasi sebagai dimaksudkan di atas, umat Islam punya maksud memperjuangkan kembali

¹⁸ Suara Muhammadiyah, No. 9. Nopember 1965.

¹⁹ BJ. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, Grafiti Pers, 1985, Jakarta, hal. 164.

legalisasi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 sebagaimana pada masa yang lalu. Akan tetapi pemerintah yang baru (ABRI, khususnya AD) yang berperanan penting dalam penumpasan G 30 S / PKI telah mengumumkan pernyataan sikapnya yaitu mereka akan menentang golongan manapun yang akan menyimpang dari Pancasila sebagai dasar negara, termasuk golongan sayap kanan. Hal itu dikatakan Samson sebagai berikut :

Para perwira akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun, dari pihak manapun, dan golongan apapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD '45 seperti yang telah dilakukan oleh pemberontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia. 20

Sebagai perwujudan sikap para perwira itu, mereka tidak mengizinkan adanya pembahasan baru apapun yang berkenaan dengan Islam dalam kaitannya dengan negara . Hal itu telah menjadi kenyataan, bahwa MPRS dalam sidang-sidangnya pada bulan Juni-Juli 1966 dapat menegakkan suatu pembicaraan baru mengenai Piagam Jakarta. Dalam sidang-sidangnya selanjutnya pada bulan Pebruari-Maret 1967 hanya membicarakan satu-satunya agenda mengenai pencabutan kekuasaan dari Presiden Sukarno dan mengangkat Jendral Suharto sebagai Penjabat Presiden.- Sedangkan suatu usaha untuk menambahkan beberapa tuntutan Islam dalam agenda telah ditolak, misalnya agar presiden harus seorang Muslim dan agar negara didasarkan kepada Islam. 21

Kasus sebagaimana dimaksudkan diatas telah menimbulkan banyak kekecewaan dikalangan umat Islam, ka-

²⁰ I b i d., hal. 164.

²¹ I b i d., hal. 165.

rena harapan-harapan mereka banyak terjawab dengan kenyataan yang tidak diharapkan. Kasus lain yang sangat mengecewakan dan tidak diduga sebelumnya adalah gagal nya usaha rehabilitasi Partai Islam Masyumi oleh beberapa eks anggotanya, karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang baru.

Pada tanggal 13 September 1960 pimpinan Masyumi[✓] menyatakan bahwa partai itu bubar, hal itu, dilakukan karena pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden mengeluarkan keputusan membubarkan partai berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam penpres No. 7 Tahun 1959 dan Penpres No. 13 Tahun 1960.²² Dasar pertimbangan pimpinan partai itu membubarkan partainya adalah apabila partai itu tidak dibubarkan sampai batas waktu tanggal 17 September 1960, maka partai itu menjadi partai terlarang. Maka - dari itu tidak benar kalau dikatakan bahwa Masyumi adalah partai terlarang, yang benar menurut Hukum Masyumi secara sah tidak ada.²³

Prawoto Mangkusasmito selaku pucuk pimpinan pada waktu partai itu membubarkan diri mengatakan bahwa pembubaran partai itu sebetulnya dilakukan secara terpaksa, oleh karenanya tindakan itu disertai dengan sebuah protes yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah adalah illegal artinya tidak menurut hukum. Selanjutnya dia mengatakan bahwa " tindakan pemerintah itu melawan

²²Presiden mengeluarkan keputusan membubarkan Partai itu karena sebagian tokohnya terlibat langsung dalam pemberontakan PRRI/Permesta, sedangkan partai itu tidak mengutuk mereka. Mereka yang terlibat itu ialah Moh. Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap. Lihat Sumarso Sumarsono, Muhammad Roem 70 Tahun : Pejuang Perunding, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 88-89.

²³SU. Bayasut, Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Documenta, Surabaya, 1972, hal. 191 - 192.

hukum dan kita ingin hidup secara negara hukum, maka badan yang berwewenang yaitu pengadilanlah yang dapat memberi kata putus ". Dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut maka dia mengajukan gugatan kepada pengadilan Negeri supaya membatalkan keputusan Pemerintah itu.²⁴ Dengan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa suatu usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi sudah dilakukan sejak masa Orde Lama. Namun karena suasana yang tidak memungkinkan, maka usaha itu tampaknya sia-sia.

Peralihan Pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru rupanya telah memberi angin segar kepada tokoh-tokoh partai itu. Diantara tokoh-tokoh yang dipenjarakan oleh Presiden Sukarno mulai dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru.²⁵ Pada waktu acara tasyakuran menyambut mereka yang diadakan di komplek Masjid Al-Azhar Kebayoran Jakarta, para tokoh partai itu sudah mendesas-desuskan suatu usaha untuk merehabilitasi Masyumi yang sudah bubar sebagai akibat tindakan pemerintah Orde Lama yang illegal. Langkah awal untuk maksud itu adalah pengiriman nota kepada Pangdam V Jaya Mayor Jendral Amir Mahmud yang menerangkan duduk persoalan yang menyangkut Masyumi, yang dipelopori oleh Bapak Kyai Haji Fakih Usman.²⁶

Sebagai tindak lanjut untuk maksud itu, dibentuklah " Panitia Rehabilitasi Masyumi " dibawah pimpi-

²⁴ I b i d., Masalah selengkapnya lihat hal.164-177

²⁵ Mereka itu ialah HAMKA, Burhanuddin Harahap, Mohammad Roem, Haji Hasan dan Tokoh-tokoh Islam lainnya. Lihat Panji Masyarakat, no.379, hal. 21.

²⁶ SU. Bayasut, Op. Cit., hal. 193.

nan Syarif Usman. Disamping itu dibentuk pula Badan Kordinasi Amal Muslimin (BKAM) yang bertujuan untuk menghimpun semua anggota Istimewa Masyumi yang bergerak dalam bidang sosial pendidikan dan apabila Masyumi berhasil direhabilitasi maka BKAM itulah dirubah menjadi Masyumi.²⁷ Usaha itu lebih dikumandangkan lagi secara terbuka setelah Sukarno disisihkan dari kegiatan politik aktif (setelah 11 Maret 1966), para pemimpin bekas Masyumi segera akan diizinkan melakukan kegiatan nya. Sejak bulan Juni 1966 banyak organisasi Islam, terutama Muhammadiyah secara terbuka menganjurkan kembalinya Masyumi. Namun apa boleh dikata, para Perwira - (ABRI khususnya AD) telah menyatakan akan menentang siapapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD'45 sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Dalam pernyataan itu telah disebutkan beberapa gerakan yang pernah menyimpang dari Pancasila dan UUD '45, termasuk apa yang pernah diperbuat oleh para tokoh Masyumi.²⁸

Dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut, maka pihak pemerintah tidak mengizinkan Masyumi berdiri kembali. Demikian nasib Partai Masyumi dan para pendukung nya, dan hal ini telah menimbulkan kekecewaan besar dikalangan mereka. Kekecewaan itu telah menyebabkan frustasi, sehingga mereka banyak yang meninggalkan ke-

²⁷ Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumo , 31 Oktober 1986, di Yogyakarta.

²⁸ Perbuatan para tokoh Masyumi yang dianggap menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 adalah karena mereka selalu berjuang untuk menggantikan Pancasila dengan Islam dan keterlibatan para tokoh Masyumi dalam pemberontakan PRRI/Permesta yang terang-terangan membe rontak kepada Pemerintah yang sah. Sehingga ABRI dalam pernyataannya menganggap Masyumi senafas dengan PKI, -

giatan politik. Mereka banyak menyibukkan diri dengan kegiatan keagamaan atau kebudayaan atau bahkan membisu. Dan mereka banyak menekuni kembali dunia bisnisnya yang mereka terjun sejak Masyumi bubar pada tahun 1960.²⁹

Ditengah kekecewaan itu, mereka masih bersemangat mencari jalan lain untuk menyalurkan aspirasi politiknya, yaitu dengan jalan mendirikan partai baru yaitu Partai Muslimin Indonesia.³⁰ Pemerintah sendiri punya maksud untuk menyalurkan aspirasi politik organisasi eks anggota Masyumi yang tidak mau menyalurkan aspirasinya kedalam partai politik yang ada, karena hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berkat kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak pimpinan eks anggota Masyumi itu, maka diputuskan pada tanggal 7 April 1967 berdirinya Partai Muslimin Indonesia.³¹ Partai itu berdiri didukung oleh 16 organisasi-sosial pendidikan keagamaan, sebagai eks anggota Isti-mewa Masyumi yang tergabung dalam Badan Kordinasi Amal Muslimin.³² Partai baru itu didirikan dengan SK. Presiden No. 70 Tahun 1968, yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Bapak Djarnawi Hadikusumah sebagai ketua umum dan Drs. Lukman Harun sebagai Sekretaris Jendral. Partai yang baru itu dimaksudkan untuk menampung aspi-

tentunya hal itu tidak bisa diterima oleh pimpinan Masyumi. Hal itu sempat menimbulkan polemik antara pimpinan Masyumi (Prawoto Mangkusasmito) dan pimpinan ABRI (Jendral Suharto). Lihat selengkapnya SU. Bayasut, Op. Cit., hal. 210 - 216.

²⁹BJ. Boland, Op. Cit., hal. 157.

³⁰Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumah, 30 Oktober 1986, di Yogyakarta.

³¹Suara Muhammadiyah, No.12 Tahun ke-66/Juni - II 1986, hal. 20.

³²Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumah, 1 Nopember 1986, lihat cat.kaki no.2 pada bab III.

rasi politik eks anggota Masyumi, tapi pemerintah tidak mengizinkan tokoh-tokoh utama bekas Masyumi untuk ikut aktif memimpin langsung partai itu, mereka hanya diperkenankan memimpin dari belakang dan duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai. Hal itu disampaikan kepada Pengurus Badan Koordinasi Amal Muslimin oleh Presiden Suharto di Istana Merdeka.³³ Oleh karena itu banyak orang mempertanyakan apakah Parmusi itu sebagai kelanjutan dari Masyumi atau partainya orang-orang yang pro pemerintah atau bahkan partainya pemerintah.

Demikianlah sejarah berdirinya Partai Muslimin Indonesia, sebagai kasus integrasi dari organisasi sosial keagamaan untuk yang pertama kali dalam era Orde Baru.

³³ Sumarso Sumarsono, *Op. Cit.*, hal. 365. Juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Djarnawi - Hadikusuma⁶, 1 Nopember 1986, di Yogyakarta.

C. Sejarah Perkembangan Parmusi.

Berdirinya Partai Muslimin Indonesia menutup kemungkinan rehabilitasi Masyumi dan berdirinya partai baru, karena berdirinya partai itu dimaksudkan oleh pemerintah untuk menampung aspirasi politik organisasi eks anggota Masyumi dan organisasi lain yang tidak mau menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik - yang sudah ada. Dari sisi lain, berdirinya Parmusi yang merupakan jawaban pemerintah atas tidak diizinkannya - rehabilitasi Masyumi itu, adalah kasus awal dalam era Orde Baru yang mencerminkan usaha pemerintah untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Kasus lain yang mencerminkan hal itu terjadi dalam tubuh Partai Nasional Indonesia. Dalam konggresnya di Bandung tahun 1966, para pimpinan yang tergolong sayap kiri dan beraliran radikal seperti Ali Sastroamijoyo dan Ir. Surahman dapat disingkirkan dan diganti oleh Osa Malik dan Usep Ranawidjaya. Hal itu bisa terjadi sebagai akibat campur tangan militer (pemerintah),³⁴ serta hal itu memberikan isarat atas keberhasilan Pemerintah Orde Baru didalam mengetrapkan konsep dan strategi politiknya sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II pasal C.

Keterlibatan Pemerintah terhadap keberadaan Partai Muslimin Indonesia tampak nyata sejak proses berdirinya partai itu sampai perkembangannya. Kasus di tunda-tundanya pengesahan berdirinya partai adalah satu hal yang mencerminkan keterlibatan pemerintah terhadap keberadaannya. Di tunda-tundanya pengesahan berdiri

³⁴Rusli Karim, Op. Cit., hal. 157.

nya partai itu karena banyak personalia eks pimpinan Masyumi yang tidak disukai Pemerintah duduk di kepengurusannya. Namun ketika para pendukung Parmusi pada tanggal 15 Pebruari 1967, menghadap ke Istana dan menyatakan kepada Presiden bahwa personalia yang menjadi pimpinan periode ini hanya terdiri dari orang-orang yang waktu Masyumi dibubarkan tidak memegang kedudukan penting dalam partai itu,³⁵ maka mulai saat itulah sudah ada semacam kata sepakat dari Pemerintah.

Kasus berdirinya Parmusi dengan keterlibatan Pemerintah sedemikian jauh, menurut Umaid Radi disamping tertutupnya kemungkinan rehabilitasi Masyumi dan berdirinya Islam baru, juga merupakan jalur bagi Pemerintah sebagai pintu masuk untuk mengendalikan kekuatan politik Islam.³⁶ Tapi, bagi kekuatan politik Islam hal itu telah menimbulkan perpecahan baru, yaitu antara yang setuju rehabilitasi Masyumi dengan mereka yang mau menerima wadah baru (Parmusi). Kemudian perpecahan antara orang-orang yang mendukung berdirinya Parmusi antara yang pro campur tangan Pemerintah dengan yang menolaknya.

Apa yang dijelaskan di atas adalah sesuai dengan apa yang dikatakan Ajip Rosyidi, sebagai berikut :

Partai Muslimin tak berhasil menjadi wadah buat menampung umat dan organisasi Islam non-partai. Artinya Partai Muslimin Indonesia tak berhasil menjadi wadah untuk mempersatukan umat dan organisasi

⁽³⁵⁾ Ajip Rosyidi, Beberapa Masalah Umat Islam di Indonesia, Bulan Sabit, Bandung, 1970, hal. 64.

⁽³⁶⁾ Umaid Radi, Strategi PPP 1973 - 1982, Integritas Press, Jakarta, 1984, hal. 69.

Islam non-partai. Lahirnya Partai Muslimin Indonesia bahkan menimbulkan perpecahan lagi di kalangan umat dan organisasi Islam. Yaitu perpecahan di kalangan Jemaah Masyumi antara orang-orang - yang hanya mau rehabilitasi Masyumi dengan orang-orang yang mau menerima wadah baru sebagai penampung Jemaah Masyumi. Kemudian perpecahan di kalangan organisasi-organisasi Islam yang mau menerima wadah baru itu sendiri, antara yang pro campur tangan Pemerintah dalam menentukan personalia pimpinan Partai Muslimin Indonesia yang sesungguhnya merupakan urusan intern organisasi dengan yang menolaknya. 37

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa berdirinya Parmusi adalah merupakan keberhasilan Pemerintah mengendalikan kekuatan politik Islam, sedangkan bagi kekuatan politik Islam, hal itu merupakan kasus kegagalan integrasi diantara mereka. Keberadaan Partai Muslimin Indonesia dengan segala masalahnya dalam perkembangan selanjutnya, adalah mencerminkan betapa Pemerintah berhasil menjinakkan dan menaklukkan tokoh-tokohnya Masyumi. Hal itu terbukti tidak pernah berhasilnya tokoh-tokoh Masyumi memimpin partai itu, karena Pemerintah selalu mengontrol dan mengendalikan keberadaan dan kegiatan partai itu selanjutnya.

Kegagalan tokoh-tokoh Masyumi memimpin partai itu telah menimbulkan kekecewaan diantara mereka khususnya, tapi di sisi lain berdirinya Parmusi mendapat sambutan dari generasi muda Islam yang diperkenankan memimpin partai itu. Namun kalangan generasi muda sendiri dalam memimpin partai masih kurang percaya kepada diri sendiri, terutama dalam rangka menghadapi pemilu (pemilihan umum) yang direncanakan tahun 1969, tapi

³⁷ Ajip Rosyidi, Op. Cit., hal. 64.

akhirnya ditunda tahun 1971.³⁸ Dengan demikian masih ada kecenderungan kuat untuk menampilkan kembali tokoh-tokoh tua Masyumi yang dianggap mempunyai massa. Sehingga pimpinan partai itu, baik Djarnawi Hadikusumah maupun Lukman atau lainnya sering didampingi oleh tokoh-tokoh tua Masyumi pada waktu mengadakan kunjungan ke daerah-daerah.³⁹

Kecenderungan tampak jelas dalam Kongres Partai Muslimin Indonesia pertama yang berlangsung dari tanggal 4-7 Nopember 1968 di Malang Jawa Timur. Salah satu keputusan Kongres adalah memilih Mohammad Roem sebagai ketua umum Parmusi dengan suara bulat,⁴⁰ tanpa menghiraukan anjuran Pemerintah agar jangan menampilkan tokoh-tokoh Masyumi kelas satu untuk memimpin langsung partai itu. Namun begitu Mohammad Roem terpilih, Pemerintah melalui sekretaris Negara Letnan Jendral Alamsyah Ratuprawiranegara mengirimkan teleks kepada para peserta kongres bahwa Pemerintah tidak menyetujui pengangkatan Mohammad Roem sebagai ketua umum Parmusi.⁴¹

Dengan kasus di atas, peserta Kongres menjadi kalang kabut, maka untuk menenangkan suasana Kongres memutuskan bahwa Mohammad Roem tetap dipilih sebagai ketua umum Parmusi non-aktif. Selama Mohammad Roem belum mendapat persetujuan dari Pemerintah, maka pimpi-

³⁸Umaid Radi, Op. Cit., hal. 70.

³⁹Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumah, 31 Oktober 1986, di Yogyakarta.

⁴⁰Masashi Nishihari, Golkar And The Indonesian Election of 1971, Cornell University Ithaca, New York, 1972, hal. 9.

⁴¹HA.Basit Adnan, Ada Apa di PPP ?, Mayasari, Solo, 1982, hal. 31.

nan Parmusi tetap dipegang oleh Djarnawi Hadikusumah, dan Drs. Lukman Harun.⁴² Sedangkan Mohammad Roem sendiri menyatakan bahwa dia bersedia memimpin Parmusi apabila telah mendapat persetujuan dari Pemerintah,⁴³ tapi hal itu tidak pernah didapatkannya sampai perkembangan selanjutnya.

Campur tangan Pemerintah terhadap hasil Kongres itu telah menimbulkan kritik yang tajam, yang ditujukan kepada Pemerintah yang dilakukan oleh umat Islam khususnya eks Masyumi. Mereka memandang bahwa kebijaksanaan Jendral Suharto dan para perwira Angkatan Darat yang menolak terpilihnya Mohammad Roem sebagai ketua umum Parmusi adalah sukar diterangkan. Hal itu, karena Mohammad Roem sama sekali tidak terlibat dalam pemberontakan PRRI.⁴⁴ Sedangkan bagi mereka kepemimpinan Mohammad Roem diharapkan dapat menarik simpati kaum Muslimin, khususnya eks anggota Masyumi terhadap partai itu, sehingga partai itu diharapkan menjadi partai Islam terbesar seperti Masyumi pada waktu dahulu.

Perkembangan Partai Muslimin Indonesia dibawah kepemimpinan sementara, kurang mendapat simpati dari kaum Muslimin. Ditambah lagi terjadinya perselisihan didalam tubuh partai itu, sehingga terbentuklah - PP. Parmusi Tandingan yang dipimpin oleh HJ. Naro, Drs Imran Kadir, Drs. Darus Samin dan kawan-kawan. Terben

⁴²Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumah, 1 Nopember 1986, di Yogyakarta.

⁴³Umaid Radi, Op. Cit., hal. 71.

⁴⁴BJ. Boland, Op. Cit., hal. 159.

tuknya pengurus pertandingan itu karena kepengurusan di bawah kepemimpinan Djarnawi dianggap kurang sejalan dengan keinginan Pemerintah dan dituduh akan membawa Parmusi menjadi Masyumi. Sedangkan pengurus pertandingan dibawah pimpinan Naro dan kawan-kawan adalah pro Pemerintah. Dengan demikian ada kesan bahwa pengurus pertandingan itu memang dikehendaki oleh Pemerintah.⁴⁵

Sebagai penyelesaian kasus itu, lagi-lagi Pemerintah berperan sebagai sutradara yaitu dengan mengangkat Mintaredja sebagai ketua umum Parmusi dengan SK. Presiden No. 77/1970.⁴⁶ Pimpinan yang baru itu tampaknya lebih condong pada kelompok Naro, hal itu dapat dilihat pada kebersamaan mereka dalam Parmusi selanjutnya. Bukan hanya itu, ketika Parmusi bersama-sama dengan unsur lainnya bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan dan Mintaredja duduk sebagai ketua umum, tidak ketinggalan juga HJ. Naro duduk sebagai salah satu ketua⁴⁷ sedangkan Djarnawi dan Lukman sudah tamat riwayatnya. Kemudian ketika Mintaredja diangkat Menteri Sosial, beliau menyerahkan kepemimpinan partai kepada HJ. Naro tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, yaitu muktamar karena hal itu belum mungkin untuk diadakan.

Dengan beberapa kasus di atas, dapatlah dikatakan bahwa Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Djarnawi Hadikusumah, 30 Oktober 1986, di Yogyakarta.

⁴⁶HA. Basit Adnan, Op. Cit., hal. 40.

⁴⁷Lihat Sususnan Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan pada Periode Awal.

kekuatan politik khususnya politik Islam, yaitu dengan cara menempatkan "orang-orang" di dalamnya. Mereka ditempatkan di tengah "medan" sesuai dengan skenario, baik sebagai pembawa bibit perpecahan maupun sebagai raja yang selalu memancing timbulnya perselisihan di antara rakyatnya. Hal itu merupakan sebagian strategi politik Pemerintah, yaitu melemahkan kekuatan politik. Kalau sudah demikian, maka dengan mudah Pemerintah meniti apa maunya, hal itu dapat dilihat pada kasus-kasus belakangan ini.

Perkembangan selanjutnya, bagaimana keberadaan Parmusi setelah bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan. Penggabungan keempat partai Islam itu adalah penggabungan kegiatan politik bukan penggabungan fisik. Oleh karena itu tiap-tiap unsur tetap mengurus rumah tangga sendiri dan mengatur kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang bersifat non-politik. Bersamaan dengan itu berubahlah wujud fisik dari tiap-tiap unsur, yaitu Partai Islam NU, menjadi Jamiyah NU Parmusi menjadi Muslimin Indonesia (MI), PSII menjadi SI dan partai politik Perti menjadi Perkumpulan Penderitaan Islam Perti.⁴⁸

Perubahan orientasi dari politik ke non-politik bagi ketiga unsur tidak menimbulkan masalah, selain Parmusi. Karena hal itu bagi ketiga unsur hanya merupakan pengalihan kegiatan, yang sebetulnya sudah dilakukan sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun hal itu bagi Parmusi menimbulkan masalah tersendiri,-

⁴⁸ Dialaog : KH. Saifuddin Zuhri, Drs. H. Ridwan Saidi, H. Mahbub Djunaidi dan Fachry Ali, dalam PPP, NU dan MI, Gejolak Wadah Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, hal. 3-4.

karena Parmusi hanya sebagai gabungan kegiatan politik dari beberapa organisasi Islam non-politik. Maka Muslimin Indonesia mendapatkan kesukaran kemana dia akan kembali keasala organisasi non-politiknya.

Ketika kelompok Muslimin Indonesia meng-klaim dirinya sebagai penerus Masyumi, maka banyak orang mempertanyakan dan menyangkal hal itu. Seorang tokoh Masyumi Jawa Timur menanggapi sebagai berikut :

Sejak Masyumi bubar sampai kini saya merasa tak ada partai yang dapat menyalurkan aspirasi politik saya dan sama sekali tidak benar MI sekarang adalah pelanjut atau pengganti Masyumi. 49

Drs. Lukman Harun bekas Sekjen Parmusi mengatakan "jika sekarang ada Ormas yang bernama Muslimin Indonesia dan menyatakan pelanjut dari Parmusi, maka hal tersebut sangat mengherankan dan tidak ada dasarnya sama sekali". Selanjutnya dia mengatakan, bahwa Muhammadiyah dalam Tanwirnya tahun 1977 menegaskan tidak ada hubungan historis dan organisatoris dengan Muslimin - Indonesia. Anggota Muhammadiyah dilarang merangkap - menjadi anggota Muslimin Indonesia. 50

Dengan demikian Parmusi yang pada awal berdirinya dimaksudkan untuk menampung aspirasi politik umat Islam, khususnya eks anggota Masyumi dalam perkembangan selanjutnya telah mengalami kekaburan. Kekaburan dalam struktur dan programnya telah menyebabkan partai itu berakhir tanpa ujung yang jelas.

⁴⁹Wawancara dengan KH. Misbah, 12 Agustus 1986, di Surabaya.

⁵⁰Majalah Kiblat, No. 12 Tahun XXIX Nopember I / 1981, hal. 19 - 20.